



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

# DKI Optimistis Serapan Anggaran Mencapai 83,42 Persen

Hingga kemarin malam, anggaran yang terserap baru 79,7 persen.

### Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

**JAKARTA** — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan serapan anggaran pada tahun ini bisa mencapai 83,42 persen. Target itu lebih tinggi dibanding serapan anggaran pada tahun lalu, yang hanya 81,78 persen.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah optimistis target itu bisa dipenuhi. Sebab, sejumlah kontraktor yang mengerjakan proyek milik pemerintah telah menagih pembayaran. Proyek-proyek itu, antara lain, adalah renovasi kantor kelurahan dan kecamatan. Selain itu, terdapat proyek renovasi gedung sekolah. “(Rehabilitasi) sekolahnya yang banyak,” katanya. “Ini lagi proses pembayaran.”

Berdasarkan data di situs <http://publik.bapedadki.net>, serapan anggaran pemerintah DKI Jakarta hingga kemarin malam baru mencapai 79,7 persen, atau baru terserap Rp 62 triliun, dari alokasi belanja langsung dan tidak langsung sebesar Rp 77,85 triliun. Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan DKI pada tahun ini mencapai Rp 86,89 triliun.

Saefullah mengungkapkan defisit anggaran daerah menjadi salah satu penyebab serapan anggaran belum mencapai 80 persen. Defisit itu terjadi karena dana bagi hasil dari pemerintah pusat sebesar Rp 6,39 triliun belum turun. Akibatnya, pemerintah DKI sempat mengerem belanja. “Ya,

mau bagaimana? Uangnya enggak ada, disuruh menyerap (anggaran). Kan kami harus jaga *cash flow*,” ujarnya.

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Juaini Yusuf juga optimistis serapan anggaran bisa mencapai 80 persen pada akhir tahun ini. Meskipun hingga kemarin sore dinasnya baru menyerap 48,5 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 2,1 triliun.

Juaini mengklaim serapan anggaran di Dinas SDA terus meningkat menjelang akhir tahun ini. Dia mencontohkan rencana pembayaran pengadaan tanah untuk waduk sebesar Rp 131 miliar. Selain itu, Dinas SDA akan membayar tagihan kepada pihak lain untuk sejumlah proyek, misalnya perbaikan pompa dan naturalisasi waduk. “Meski jumlahnya enggak besar, lumayan untuk menambah serapan anggaran,” ucapnya.

Ia mengungkapkan dinasnya sempat mengerem belanja, khususnya pembelian lahan, karena defisit anggaran daerah. Pada tahun ini, Dinas SDA mendapat anggaran pengadaan tanah untuk naturalisasi sungai dan waduk sebesar Rp 1,083 triliun.

Juaini mengklaim belum optimalnya penyerapan anggaran tidak berdampak pada program antisipasi banjir. Sebab, sebagian dana pembebasan lahan untuk naturalisasi waduk hanya dimaksudkan untuk merapikan daerah di sekitar waduk. “Karena waduknya sudah ada (untuk menampung air),”

ujarnya.

Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Eko Suroyo, mengatakan serapan anggaran Dinas Perumahan belum optimal. Hingga kemarin, serapan anggaran Dinas Perumahan hanya mencapai 27,67 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 946 miliar.

Eko menjelaskan, salah satu anggaran yang belum terserap ialah pengadaan tanah untuk pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dan penataan kawasan permukiman sebesar Rp 300,7 miliar.

“Sejak kasus Cengkareng Barat, kami lebih hati-hati terhadap tanah yang akan dibeli,” katanya.

Selain itu, kata Eko, anggaran Dinas Perumahan belum terserap optimal karena pihaknya baru bisa memberikan uang muka proyek pembangunan dan revitalisasi rusunawa di sepuluh lokasi sebesar 10 persen. Dinas Perumahan baru berkontrak dengan kontraktor yang mengerjakan proyek melalui skema tahun jamak itu pada bulan ini. “Lelangnya lama karena sempat ada beberapa kali *review*,” tuturnya.

## Akibat Perencanaan Tak Matang

**A**NGGOTA Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta, Pantas Nainggolan, menilai pemerintah DKI tidak matang dalam menyusun perencanaan anggaran daerah. Penilaian itu terbukti dari penyerapan anggaran yang belum mencapai 80 persen. Menurut dia, seharusnya pemerintah Jakarta tak menyalahkan defisit anggaran karena belum turunnya dana bagi hasil dari pemerintah pusat. “Kan pemerintah bisa menggenjot pendapatan dari pajak,” ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Berikut ini serapan anggaran di sejumlah perangkat daerah.

No.	Dinas	Serapan Anggaran (persen)
1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27,6
2	Dinas Sumber Daya Air	48,7
3	Dinas Bina Marga	49,6
4	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan	64,2

### Keterangan:

Data serapan anggaran per 26 Desember 2019

SUMBER: [HTTP://PUBLIK.BAPEDADKI.NET](http://publik.bapedadki.net)